



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP  
NOMOR 13 TAHUN 1992 SERI D NO.9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CILACAP**

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah adalah merupakan suatu rangkaian panjang dari proses perjalanan kehidupan suatu Bangsa, Negara atau Daerah yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau kejadian - kejadian penting yang mengandung makna dan nilai filosofis yang dapat mengilhami serta membimbing warganya menjadi lebih arif dalam menghadapi masa depan;
  - b. bahwa Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang merupakan bagian dari sejarah Daerah perlu ditentukan kepastiannya guna menggugah niat baik

dan motivasi untuk mengembangkan serta membangun Daerah demi terwujudnya Cilacap Bercahaya;

c. bahwa Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP.

#### Pasal 1

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap adalah tanggal 21 Maret 1856.

#### Pasal 2

Hari Jadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini berdasarkan "Besluit Gouverneur General Den 21 Maart 1856 N.21".

#### Pasal 3

Hari Jadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum pada buku " Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap " yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

Cilacap, 18 April 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II        TINGKAT II  
C I L A C A P                            C I L A C A P

K e t u a,

Cap ttd.

Cap ttd.

H. S A R D J O N O

MOHAMAD SUPARDI

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

I. PENJELASAN UMUM.

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap adalah merupakan salah satu unsur yang penting dari identitas daerah ini. Oleh karena sifat-sifatnya yang monumental, memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya yang khas serta kedudukannya yang strategis yaitu merupakan bagian dari perjalanan sejarah dari daerah ini, maka Hari Jadi tersebut perlu dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil seminar terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 1991 dengan diikuti oleh Sejarawan, tokoh-tokoh masyarakat, Muspida, Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, Ormas/Orpol, Instansi / Dinas Jawatan, telah disepakati untuk ditetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap adalah tanggal 21 Maret 1856.

Penetapan ini telah memenuhi dua persyaratan utama, yaitu tidak bertentangan dengan fakta-sejarah dan dapat diterima oleh masyarakat.

Diharapkan dengan penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tersebut berguna untuk lebih mendorong semangat membangun, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa memiliki daerahnya dan memantapkan pembentukan kepribadian yang merupakan modal dasar bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 5 Juni 1992 Nomor : 188.3/219/1992.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap ttd.

S A R D J I T O, SH.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor : 13 tanggal 23 Juli Tahun 1992 Seri D No.9.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd.

Drs. H. MUNIR

Pancasila.

Selanjutnya untuk memantapkan dasar Hukum Penetapan Hari Jadi tersebut, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : bahwa tanggal 21 Maret 1856 bertepatan dengan hari Jum'at Legi
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.

sd

**L A M P I R A N**

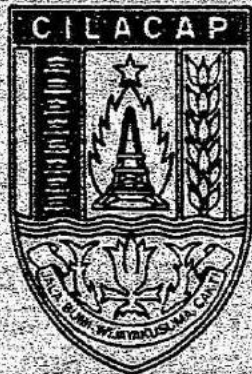
**Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Cilacap**

**Nomor : 6 Tahun 1992**

**Tanggal : 18 April 1992**

**Tentang : Hari Jadi Kabupaten Dati II Cilacap**

---



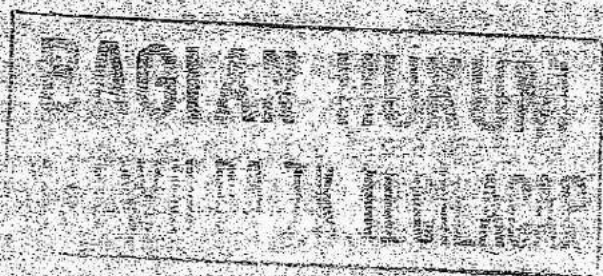
**JALA BHUMI WIJAYAKUSUMA CAKTI**

**HARI JADI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
C I L A C A P**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
C I L A C A P**

## DAFTAR ISI

	Halaman
P R A K A T A .....	i
I. PENDAHULUAN .....	1
1. Umum .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	3
3. Pendekatan .....	3
II. SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP. ....	3
1. Zaman Kerajaan Jawa .....	4
2. Zaman Penjajahan Belanda .....	7
III. PENENTUAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP .....	12



## P R A K A T A

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dapat menyusun buku " Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ".

Proses penentuan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap cukup unik dan rumit sehingga sampai pada saat penentuannya memakan waktu yang relatif lama karena harus ditelusuri dan dikaji secara hati-hati teliti dan cermat agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penetapan hari jadi sebagai titik awal keberadaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap telah memenuhi persyaratan atau kriteria dan telah disepakati bersama antara supra struktur dan infra struktur termasuk para pakar sejarah, arkeolog, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan ditentukannya Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ini bertambah lengkaplah perangkat lunak yang berdimensi filosofis, politis, historis, psikologis dan pragmatis yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

Hal tersebut untuk mempertahankan identitas, integritas dan kelangsungan hidup masyarakat serta sekaligus sebagai pendorong semangat atau animasi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap serta seluruh lapisan masyarakat dalam kiprahnya membangun daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

## I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dengan segenap jajarannya dan seluruh lapisan masyarakat, selalu berkiprah melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan jaya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain ditandai dengan berbagai predikat dan lambang yang merupakan bukti hasil kerja sama dan kerja keras segenap aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap beserta seluruh rakyat yang dengan penuh keuletan dan ketangguhan mampu mengatasi segala kesulitan, hambatan dan tantangan serta memanfaatkan peluang dan segala potensi yang ada secara optimal.

Apabila dikaji lebih mendalam keberhasilan demi keberhasilan yang telah dicapai itu tiada lain adalah merupakan dialog dinamis antara aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dengan rakyatnya, antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan lingkungan alamnya dan antara semuanya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun yang menjadi landasan dan motivasi untuk selalu berpacu dalam berprestasi dengan kepekaan dialogis tersebut, disamping juga adanya landasan normatip serta program-program yang telah dicanangkan, juga adanya dorongan aspiratif. Dorongan aspiratif dimaksud adalah motto Daerah "Jala Bhumi Wijaya Kusuma Cakti" yang merupakan gatra alamiah, kemudian diperdalam serta diperluas dengan gatra sosial yang mencakup segenap bidang kehidupan, yakni sesanti "Cilacap BERCAHAYA"

yang secara konseptual dijabarkan kedalam buku "Wawasan Cilacap BERCAHAYA". Suatu wawasan yang tidak hanya mengandung makna filosofis dan operatif tetapi menggambarkan pula perwujudan proses pendewasaan kepribadian atau jati diri yang digali, tumbuh dan berkembang dari kandungan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap sendiri dengan ciri-cirinya yang khas.

Terdorong oleh keinginan untuk mengetahui titik awal atau titik tolak terbentuknya dan keberadaan Kabupaten Cilacap dengan ciri-ciri khas itulah maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap membentuk Panitia Hari Jadi Kabupaten Cilacap.

Untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tidaklah mudah kerana tidak boleh gegabah harus teliti dan cermat berdasarkan fakta-fakta sejarah yang akurat dan sah. Dengan menggali, mencari, menemukan dan mempelajari sejarah serta memahami fakta-faktanya maka generasi sekarang yang juga merupakan bagian dari sejarah itu sendiri akan menjadi lebih arif dalam menghadapi masa depan. Untuk menjadi generasi masa depan harus mengetahui apa dan bagaimana generasi yang sekarang, dan menjadi generasi sekarang, harus tahu apa yang terjadi dimasa yang lalu.

Dari sinilah akan ditemukan awal jati dirinya yang akan terus berproses secara khas yang dapat dibanggakan, memiliki solidaritas tinggi dan kesamaan psikologis yang kokoh.

Kebanggaan yang timbul dan dimiliki generasi sekarang dan yang akan datang, tidak harus selalu ditentukan oleh kebanggaan atas saat kelahirannya atau terjadinya semata-mata, tetapi justru dari proses tumbuh dan berkembangnya serta mampu melahirkan kompensasi positif, sehingga menjadi generasi yang selalu siap berkompetisi dengan menyadari segala kekuatan dan kelemahannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu penelusuran sejarah sangatlah penting.

## 2. Maksud dan Tujuan.

Buku Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

### a. Maksud :

Sebagai perluasan dan pendalaman cakrawala pandang serta bahan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

### b. Tujuan :

- 1). Secara konseptual untuk melengkapi perangkat lunak yang sudah ada.
- 2). Untuk memantapkan nuansa penjiwaan yang dapat mempercepat daya tumbuh, daya gerak dan daya dorong yang mampu meningkatkan gairah dan semangat kerja keras serta mewujudkan kesejahteraan bersama yang semakin meningkat.

## 3. Pendekatan.

Untuk memperoleh akurasi dalam penyusunan buku ini, maka digunakan pendekatan historis - yuridis formal.

## II. SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP.

Penelusuran Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap didasarkan atas periodisasi sejarah cikal bakal Kabupaten Cilacap, yaitu Indonesia Centris dan Neerlando Centris.

Menurut pandangan masyarakat awam, periode dengan kriteria Indonesia Centris didalam riwayat jabatan para pejabat zaman kolonial disebut dengan Zaman Kerajaan Jawa (Zaman Jawa) sedangkan periode dengan kriteria Neerlando Centris disebut Zaman Penjajahan Belanda (Zaman Belanda).

Berdasarkan penelusuran sejarah ternyata bahwa didaerah cikal bakal Kabupaten Cilacap terletak batas-batas etnis dan kekuasaan pemerintahan sehingga zaman penjajahan, zaman Belanda tidak terjadi pada masa yang sama didaerah-daerah cikal bakal tersebut. Pada daerah Kabupaten Cilacap bagian barat yang antara lain di Pulau Nusakambangan, Segara Anakan dan Tanah Madura diduduki oleh Belanda sejak tahun 1706 sampai dengan tahun 1942 atau sekitar 236 tahun, sedangkan dibagian lain (bagian timur) sejak tahun 1830 atau berlangsung selama 112 tahun.

### 1. Zaman Kerajaan Jawa.

Penelusuran sejarah Zaman Kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu (901 Masehi) sampai dengan Kerajaan Surakarta (1755 - 1830).

Prasasti Luitan bertarikh 823 Saka atau 901 Masehi yang ditemukan di desa Pesanggrahan Kabupaten Cilacap tahun 1977. Prasasti tersebut memberitakan pengaduan penduduk Luitan, wilayah Kapung yang tidak mampu membayar pajak kepada Raja Mataram.

Menurut laporan yang dimuat di Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 1830 disebut Kapung loo yang mungkin berasal dari Kapung dalam prasasti Luitan.

Sedang menurut salah satu versi Banyumas, di daerah Ayah terdapat Desa Pekuncen yang disebut juga Kapung loo sebagai tempat pengasingan dan pemakaman Adipati Mangkupraja II, Patih Kerajaan Surakarta ( 1796 - 1904 ).

Desa Pekuncen sekarang termasuk Kecamatan Kroya, Ex Kawedanan Kroya, yang sebelum tahun 1933 dinamakan Distrik Adiraja atau Ayah.

Selama lima abad setelah prasasti Luitan, tidak banyak diketahui keadaan daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap.

Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit ( 1294 - 1478 ) daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasisir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari sebelah timur kearah barat terdiri dari ( 1 ) Wilayah Ki Gede Ayah dan Wilayah Ke Ageng Donan dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, (2) Wilayah Kerajaan Nusakambangan dan Wilayah Adipati Dayeuhluhur dibawah kekuasaan Adipati Pasisir Luhur dan (3) Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran.

Setelah kekuasaan Kerajaan Majapahit bergeser ke Kerajaan Demak (1478 - 1546), Adipati Pasisir Luhur tidak lagi berdiri sendiri. Dalam babad Pasisir disebutkan bahwa Adipati Pasisir Luhur menjadi Panglima Perang Kerajaan Demak dengan nama Pangeran Senopati Mangkubumi I. Dengan demikian di daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan, terbagi dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Demak di Sebelah Timur dan Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran di sebelah barat.

Menurut Hoesein Djajadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579/1580, sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu seluruh daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur dibawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon sejak tahun 1579/1580.

Kerajaan Pajang, diganti dengan Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 - 1755, maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula dibawah kekuasaan Kerajaan Pajang diserahkan menjadi bagian Kerajaan Mataram.

Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada dibawah kekuasaan Cirebon, dengan demikian cikal bakal Kabupaten Cilacap, sekarang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Mataram seluruhnya.

Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Pebruari 1682 diterima surat yang berisikan terjemahan perjalanan darat dari Tanjungpura, sebuah kota Kabupaten ditepi Sungai Citarum, sebelah utara Karawang, ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap adalah Dedayouluhur (Dayeuhluhur) dan Lambangan (Limbangan).

Pada tanggal 5 Oktober 1705 di Kartosura diadakan perjanjian antara Mataram dan Kompeni, batas timur daerah Belanda, berpindah dari Pemanukan (Krawang) ke Sungai Losari (Brebes) di Utara dan Sungai Donan (Banyumas) di Selatan. Perjanjian tersebut sebagaimana tertulis dalam

pasal II disebutkan bahwa yurisdiksi dan pemilikan tanah disebelah barat gunung-gunung dan sungai-sungai diserahkan kepada Kompeni mulai dari muara sungai tersebut kearah barat sampai Passuronan, awal dari danau dalam (binnen meir = Segara Anakan) kearah utara sepanjang tepi timur dan utara dari danau sampai muara Tsibarom (Cibeureum), sepanjang tepi timur dan utara dari rawa yang tak dapat dilalui sampai Tsisatia (Cisatya) sekitar negeri Madura, ke arah utara sebelah timur melalui Pegunungan Dailoer (Dayeuhluhur).

Dalam akte perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa para pejabat Mataram dan Kompeni yang mengikuti perundingan belum mengetahui bahwa Segara Anakan bukan sebuah danau (binnen meir) atau Nusakambangan adalah sebuah Pulau seperti yang kini kita ketahui, padahal sejak tahun 1698 para pembuat peta sudah mengetahuinya. Tapal batas Kerajaan Mataram dan kekuasaan Kompeni Belanda sejak saat penandatangan terletak didaerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap, menurut Kern juga merupakan tapal batas alamiah antara penduduk yang berbahasa Sunda di sebelah barat dan penduduk berbahasa Jawa disebelah timur.

## 2. Zaman Penjajahan Belanda.

Pembentukan Kabupaten Cilacap, pada zaman Belanda, sebagai berikut :

- a. Pembentukan Onder Afdiling Cilacap (dua bulan setelah Residen Launy bertugas) dengan besluit Gubernur Jenderal D.J De Eerens tanggal 17 Juli 1839 nomor 1, memutuskan :

" Demi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan

Cilacap, maka sambil menunggu Usul Organisasi Distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Residen di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap".

Sambil menunggu pengukuhan besluit Gubernur Jenderal, Residen Launy untuk semetara telah menyusun struktur administrasi dan struktur personalia Afdeling Cilacap.

Menurut riwayat para pejabat dan besluit pengukuhan tanggal 20 juli 1842 besluit no. 7 dapat diketahui sebagai berikut :

1). Raden Cakradimedja, Patih Banyumas pada tanggal 2 Oktober 1839 diangkat oleh Residen Banyumas Launy menjadi Patih Afdeling Cilacap.

Sebagai gantinya ditunjuk Wedana Banyumas Raden Panji Tirtokusumo.

Sedang nasib Mas Wiradika, Patih Dayu - luhur tidak disebut-sebut, padahal Jaksa dan Kliwon Dayu - luhur di Majenang dimutasi ke Cilacap.

2). Mas Wirasentika Jaksa Dayu - luhur dimutasi ke Cilacap, karena kemampuan baca tulis terbatas, sejak Juni 1840 ditunjuk Raden Sastradiwirja, juru tulis Kantor Karesidenan Banyumas menjadi Pejabat Jaksa Cilacap.

3). Tirtadirana, Kliwon Majenang dimutasikan ke Cilacap, tetapi hanya sebentar, karena terlibat penggelapan pembayaran kuli-kuli. Sebagai penggantinya adalah Mas Reksadika, mantan wedana Majenang yang pada tahun 1833 karena konflik dengan Patih Dayu - luhur Kramajuda, didegradir menjadi Kumentir Nila kemudian Kopi di

Purbalingga.

Tetapi kemudian pada bulan Juni 1840 Mas Reksadika dipromosi lagi menjadi Pejabat Wedana Cilacap, dan sebagai Pejabat Kliwon Cilacap ditunjuk Raden Surjadiputra, Hupmantri Kanil Adireja.

- 4). Mas Pertiwa, Wedana Jeruklegi yang karena pembentukan Afdeling Cilacap menjadi Wedana Cilacap, juga tidak lama.

Pada tanggal 19 Oktober 1839 beliau di - mutasikan ke Adireja, menggantikan Mas Wirjamenggala, putra Demang Gumelem Nur daiman, yang dipindahkan ke Purworejo Ka bupaten Banjarnegara.

Oleh karena itu Mas Reksadika yang baru sebentar menjabat Kliwon di Cilacap di - angkat menjadi pejabat Wedana Cilacap se - jak Juni 1840. Tetapi penyakit Mas Pertiwa di Adireja kumat lagi sehingga pada bu - lan Nopember 1848 digantikan oleh mas Reksadiwirja, Mantri Gudang Kopi.

Mas Pertiwa karena kesalahannya diadili oleh Pengadilan tinggi dan pada tanggal 21 Desember 1840 menerima keputusan hu - kuman 4 tahun kerja paksa, dan atas dis - posisi Komisaris Inspektur di Semarang tanggal 22 Maret 1841 mendapat hukuman penjara. Ternyata keputusan Residen Launy tidak segera diajukan Gubernur Jenderal, akhirnya setelah lebih dari satu setengah tahun Wakil Gubernur Jenderal Mr. P. Merkus memutuskan menyetujui usul struktur Ad - ministrasi Afdeling Cilacap yang diajukan lebih dulu.

Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk diperintah oleh Bupa - ti Purwokerto dan Bupati Banyumas maka

dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 no -  
mor 10 ditetapkan :

"Patteschap" Dayu - luhur dipisahkan  
dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan sa-  
tu afdeling tersendiri yaitu afdeling Ci-  
lacap dengan ibukota Cilacap.

Yang menjadi tempat kedudukan Kepala  
Bestir Eropa, Asisten Residen dan Kepala  
Bestir Pribumi Ranga atau Onder Regent  
dengan gaji f 150 per bulan. Dengan demi-  
kian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder  
Regentschap (Onder Kabupaten).

Kalau dilihat gajinya Onder Regent seta-  
raf Patih Kepala Daerah Dayu - luhur.

Bagaimanapun pembentukan Afdeling ini  
memenuhi keinginan kedua Bupati Purwokerto  
Adipati Martadiredja II dan Bupati  
Banyumas Adipati Cakranegara I, yang  
sudah sejak lama ingin mengurangi dae-  
rah-daerah kekuasaan masing-masing de-  
ngan Patteschap Dayu - luhur dan Dis-  
trik Adireja, agaknya pada waktu itu  
luas wilayah dan jumlah penduduk malah  
menjadi beban sebagai akibat pemusatan  
Patteschap Dayu - Luhur, Kabupaten  
Purwokerto menjadi sempit dan merosot  
karena kedudukan Assisten Residenpun di-  
hapus sesuai dengan keinginan besluit  
tanggal 17 Juli 1839 nomor 1.

Adapun batas Distrik Adireja ( Ayah )  
yang bersama Patteschap Dayu - Luhur  
membentuk Onder Regentschap Cilacap me-  
nurut Rencana Residen Banyumas de Stur-  
ler tertanggal 31 Maret 1831 yang diku-  
kuhkan dengan Resolusi tanggal 22  
Agustus 1831 nomor 1 adalah sebagai be-  
rikut :

Dari muara sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara Pegunungan Kendeng dan terutamanya di atas puncak Gunung Duwur, menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). Dari sana ke arah selatan mengikuti batas Karesidenan Banyumas dan Bagelen menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu.

Dari batas-batas Distrik Adireja dapat diketahui bahwa Distrik Adireja sebagai Cikal Bakal ex Kawedanan Kroya, lebih besar dari pada ex Kawedanan Kroya, karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari sebagian Distrik Adireja dan sebagian Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan Onder Kabupaten Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap sekarang.

Jadi boleh dikatakan bahwa Onder-Kabupaten Cilacap sebetulnya merupakan kesinambungan perubahan struktur kekuasaan pemerintahan daerah Negeri Dayu-Luhur yang pada saat-saat terakhir dengan nama Patthschap Dayu-Luhur mengalami pemekaran wilayah dengan sebagian wilayah Distrik Adireja, perpindahan ibukota dari Majenang ke Cilacap dan perubahan nama dari Dayu-Luhur ke Cilacap, menjadi Onder Kabupaten atau Onder Regentschap Cilacap sesuai ketetapan Besluit Wakil Gubernur Jenderal Mr. P. Merkus tertanggal 27 Juni 1841 nomor 10.

- b. Pada masa Residen Banyumas ke 9, Van Der Moore, pengajuan usul Pemerintah Hindia Be-

landa tanggal 2 Oktober 1855 yang ditanda -  
ngani Gubernur Jenderal Duijmaer Van Twist,  
kepada menteri kolonial kerajaan Belanda,  
mendapat persetujuan raja Belanda dalam Ka-  
binet-srescript van 29 December 1855 No 86,  
dan dengan surat rahasia Menteri Kolonial  
tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A disampai -  
kan kepada Gubernur Hindia Belanda.

Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut  
menteri kolonial sebetulnya bermakna dua ,  
pertama adalah permohonan persetujuan pem -  
bentukan Kabupaten Cilacap dan Organisasi  
Bestir Pribumi, sedang yang kedua adalah  
pengeluaran anggaran biaya lebih dari f  
5,220 per tahun, yang keduanya memerlukan  
persetujuan Raja Belanda. Setelah menerima  
surat rahasia menteri kolonial, Pemerintah  
Hindia Belanda dengan Beslit Gubernur Jen -  
deral tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara  
lain menetapkan " Onder-Regentschap Cilacap  
ditingkatkan menjadi Regentschap ( Kabupa -  
ten ) Cilacap.

### III. PENENTUAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP.

Penentuan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kriteria atau persyaratan yang harus dipe<sup>n</sup>nuhi :
  - a. Berdasarkan fakta sejarah yang autentik.
  - b. Dapat diterima oleh masyarakat.
2. Upaya yang ditempuh :
  - a. Upaya awal.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap Nomor : 433.05/46401/tahun 1989 tanggal 26 Agustus 1989 tentang Pembentukan Panitia Hari Jadi Cilacap.

Kemudian pada tanggal 20 Maret 1990 panitia tersebut menyelenggarakan sarasehan / seminar untuk membahas buku " Menelusuri Sejarah Cikal-Bakal Hari Jadi Cilacap Berdasarkan Data Prasasti Kuno " yang disampaikan oleh M.M. Sukarto K. Atmodjo.

- b. Upaya akhir.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap Nomor : 433.05/1049/26/tahun 1991 tanggal 3 Desember 1991 tentang Pembentukan Panitia Hari Jadi Kabupaten Cilacap.

Kemudian pada tanggal 23 Desember 1991 panitia tersebut menyelenggarakan sarasehan/seminar untuk membahas buku "Hari Jadi Kabupaten Cilacap Alternatif Dari Alternatif" yang disampaikan oleh dr. Soedarmadji.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,  
maka Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II  
Cilacap ditentukan tanggal 21 Maret 1956.

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
C I L A C A P

ttd

H. SARDJONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I L A C A P

ttd

MOHAMAD SUPARDI